Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah
Volume 4, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN :2988-2230 ; p-ISSN :2988-2249, Hal. 108-116
DOI: https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i4.3490
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah

Analisis Struktural dan Kinerja Finansial Industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indonesia: Evaluasi Pertumbuhan Aset, Dinamika Kepesertaan, dan Rasio Pembayaran Manfaat Periode 2025–2026

Syarifudin Yunus
Universitas Indraprasta PGRI – Ketua Dewan Pengawas DPLK SAM, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: syarif.yunus@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the structural development and financial performance of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) industry in Indonesia from June 2025 to June 2026 using a descriptive quantitative approach based on aggregated DPLK industry data. This study examines the dynamics of growth in assets under management, shifts in membership patterns, and the efficiency of benefit disbursements across two main schemes: the Defined Contribution Pension Program (PPIP) and the Other Benefits Program (PML). The results show that total DPLK assets grew by 7.39%, reaching Rp161.78 trillion as of June 2026. This growth was accompanied by a 2.50% expansion in participant enrollment, bringing the total to 4.22 million participants. A significant structural divergence occurred, with individual enrollment (PPIP) contracting by -1.29%, while corporate enrollment (PML) surged by 10.78%. In addition, the industry recorded benefit payments totaling Rp14.20 trillion as of June 2026. Policy implications and practical recommendations are presented to strengthen governance, mitigate liquidity risk, and optimize the market penetration of pension funds in Indonesia to increase assets under management and expand DPLK membership.*

Keywords: *Defined Contribution; Financial Institution; Other Benefit Programs; Pension Funds; Pension Programs.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perkembangan struktural dan kinerja keuangan industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Indonesia pada periode Juni 2025 hingga Juni 2026 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data agregat industri DPLK. Studi ini menguji dinamika pertumbuhan aset kelolaan, pergeseran pola kepesertaan, serta efisiensi penyaluran pembayaran manfaat pada dua skema utama: Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Manfaat Lain (PML). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset DPLK mengalami pertumbuhan sebesar 7,39% mencapai Rp161,78 triliun per Juni 2026. Pertumbuhan ini diiringi ekspansi partisipasi kepesertaan sebesar 2,50% menjadi 4,22 juta peserta. Terjadi divergensi struktural signifikan di mana kepesertaan individu/PPIP mengalami kontraksi sebesar -1,29%, sedangkan kepesertaan korporasi/PML melonjak sebesar 10,78%. Selain itu, industri mencatatkan realisasi pembayaran manfaat sebesar Rp14,20 triliun per Juni 2026. Implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis disajikan untuk memperkuat tata kelola, mitigasi risiko likuiditas, dan optimalisasi penetrasi pasar dana pensiun di Indonesia untuk meningkatkan aset kelolaan dan memperluas kepesertaan DPLK.

Kata Kunci: Dana Pensiun; Iuran Pasti; Lembaga Keuangan; Program Manfaat Lainnya; Program Pensiun.

1. PENDAHULUAN

Sistem perlindungan hari tua dan pengelolaan dana purnatugas di Indonesia mengalami transformasi berkelanjutan seiring peningkatan kesadaran masyarakat serta dinamika regulasi ketenagakerjaan. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memegang peranan krusial sebagai lembaga pengelola dana pensiun yang dibentuk oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Manfaat Lain (PML) atau Dana Kompensasi PascaKerja (DKPK) (Yunus, 2026)..

Meskipun potensi pasar dana pensiun di Indonesia sangat besar seiring pertumbuhan jumlah tenaga kerja produktif, tingkat penetrasi program pensiun sukarela masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai pergerakan aset kelolaan, derajat

Naskah Masuk: 31 Agustus 2026; Revisi: 30 September 2026; Diterima: 11 Oktober 2026; Terbit: 13 Oktober 2026

konsolidasi pasar, serta pola klaim manfaat menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai ketahanan keuangan dan arah perkembangan industri DPLK nasional.

Industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memegang peranan krusial dalam sistem keuangan nasional sebagai instrumen akumulasi dana purnatugas dan pengelolaan imbalan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia. Dinamika internal industri DPLK memperlihatkan adanya pergeseran atau divergensi struktural yang signifikan antara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Manfaat Lain (PML). Hal ini mengindikasikan adanya transformasi strategi di sektor dunia usaha yang semakin memprioritaskan pencadangan kewajiban imbalan pascakarya korporasi dibandingkan kepesertaan iuran pasti mandiri.

Keberlanjutan industri DPLK tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas akumulasi aset kelolaan, melainkan juga oleh efisiensi pengelolaan likuiditas dalam menyalurkan hak-hak purnatugas peserta. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif perubahan struktural, kinerja finansial, serta rasio pembayaran manfaat di industri DPLK Indonesia guna memberikan pijakan empiris bagi perumusan regulasi dan strategi pengelolaan dana pensiun yang resilien.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (UU No. 4/2023 Pasal 134). Hal ini berarti dana pensiun menjalankan program pensiun, sebagai program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Setiap orang yang menjadi peserta dana pensiun maka berhak atas manfaat pensiun, yaitu manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, dana pensiun memiliki kaitan erat dengan usia pensiun, masa kerja, dan masa mengiur.

Dana pensiun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial di hari tua ketika seseorang tidak lagi produktif secara ekonomi. Industri Dana Pensiun sebagai salah satu komponen dalam industri jasa keuangan memiliki peranan yang strategis, terutama jika dikaitkan dengan misi untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi pesertanya ketika memasuki pensiun (Apriyanto, 2020). Program pensiun bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kembali uang. Peserta menyetor iuran bulanan untuk jangka waktu iuran dimulai dari pendaftaran hingga akhir masa kerja untuk memperoleh manfaat pensiun (Mursalina, 2023; Fadly et al., 2024).

Menurut POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraaan Usaha Dana Pensiun dari OJK, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun. Selain untuk menjaga kemandirian finansial di masa pensiun, dana pensiun juga dapat menciptakan ketenangan pikiran di hari tua. Sesuai dengan Peta Jalan Dana Pensiun 2024-2028 (OJK, 2024) ditegaskan visi akan pentingnya mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penetrasi dana pensiun harus diupayakan secara optimal untuk pekerja sektor formal maupun informal. Bahkan tahun 2028 nanti, diharapkan tingkat densitas dana pensiun di Indonesia diharapkan mampu mencapai 17% dari total angkatan kerja yang ada.

Salah satu bentuk dana pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangam (DPLK). Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri (Peraturan OJK No. 27/2023). Melalui DPLK setiap orang yang menjadi peserta berhak mendapatkan manfaat pensiun, yaitu manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua. Menjadi peserta DPLK berarti membayar iuran secara berjalan untuk masa pensiun.

Oleh karena itu, kajian tentang analisis struktural dan kinerja finansial industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Indonesia sebagai evaluasi pertumbuhan aset, dinamika kepesertaan, dan rasio pembayaran manfaat periode 2025–2026 perlu dilakukan untuk memahami peta dana pensiun dan nilai manfaat bagi peserta serta memperkuat keberlanjutan sistem dana pensiun di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif-eksplanatori berbasis data sekunder. Sumber data menggunakan data sekunder agregat dari laporan kinerja operasional *unaudited* internal Asosiasi DPLK (ADPLK) per posisi Juni 2025 dan Juni 2026 yang mencakup 25 institusi pengelola DPLK di Indonesia.

Variabel utama yang dianalisis mencakup: 1) Aset Kelolaan (Assets Under Management / AUM) total serta perincian PPIP dan PML, 2) Jumlah Kepesertaan (individu dan kelompok/perusahaan), 3) Jumlah Perusahaan Pemberi Kerja yang berpartisipasi, dan4) Volume Pembayaran Manfaat yang direalisasikan oleh pengelola DPLK (Sari et al., 2025)..

Teknik analisis data mencakup analisis pertumbuhan tahunan (Year-on-Year/YoY Growth) untuk menghitung laju pertumbuhan persentase aset, kepesertaan, dan partisipasi perusahaan dari Juni 2025 ke Juni 2026. Analisis rasio finansial yang menghitung rata-rata akumulasi dana per peserta, rata-rata kelolaan per perusahaan, serta rasio pembayaran manfaat

terhadap total aset (*liquidity drain index*) dan analisis komparatif dengan membandingkan pola dan pergeseran struktur antara skema PPIP dan PML.

Pembahasan dan Hasil

Industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem jaminan dan kesejahteraan finansial masyarakat melalui penyediaan program pensiun yang terstruktur serta berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan industri keuangan Indonesia, kinerja DPLK tidak hanya tercermin dari pertumbuhan aset yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memperluas basis kepesertaan dan memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Periode 2025–2026 menjadi relevan untuk dikaji karena dinamika ekonomi, perubahan perilaku masyarakat dalam mempersiapkan masa pensiun, serta perkembangan regulasi dan tata kelola dana pensiun dapat memengaruhi struktur dan kinerja industri. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan DPLK diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan arah pertumbuhan industri.

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu pertumbuhan aset, dinamika kepesertaan, dan rasio pembayaran manfaat selama periode 2025–2026. Pertumbuhan aset digunakan untuk menggambarkan perkembangan kapasitas finansial dan akumulasi dana yang dikelola industri, sedangkan dinamika kepesertaan memberikan perspektif mengenai tingkat penetrasi dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program pensiun. Sementara itu, rasio pembayaran manfaat digunakan untuk melihat hubungan antara kewajiban pembayaran manfaat dengan akumulasi dana yang dikelola serta memberikan indikasi mengenai karakteristik arus keluar dana pada industri DPLK. Dengan menganalisis ketiga aspek tersebut secara terpadu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai struktur dan kinerja finansial industri DPLK Indonesia, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi perkembangan, perubahan pola, dan isu yang perlu diperhatikan dalam penguatan industri dana pensiun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kinerja finansial industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indonesia selama periode 2025–2026, dengan fokus pada tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan aset, dinamika kepesertaan, dan rasio pembayaran manfaat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan aset DPLK selama periode penelitian; 2) menganalisis perubahan jumlah dan karakteristik kepesertaan sebagai indikator perkembangan cakupan industri; 3) mengukur dan mengevaluasi rasio pembayaran manfaat dalam kaitannya dengan posisi dan pertumbuhan aset; serta 4) menginterpretasikan keterkaitan ketiga indikator tersebut untuk

memperoleh gambaran mengenai pola pertumbuhan, struktur keuangan, dan dinamika kinerja industri DPLK Indonesia.

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris melalui penyediaan analisis yang terintegrasi mengenai perkembangan aset, kepesertaan, dan pembayaran manfaat DPLK pada periode 2025–2026. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola DPLK dalam memahami perkembangan basis kepesertaan, kapasitas pengelolaan aset, serta dinamika arus pembayaran manfaat, sehingga dapat mendukung perencanaan strategi pengembangan industri dan penguatan keberlanjutan program pensiun. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi perkembangan industri DPLK, khususnya terkait perluasan kepesertaan, pertumbuhan dana pensiun, dan kesiapan industri dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai industri dana pensiun di Indonesia, khususnya penelitian yang menghubungkan indikator pertumbuhan, kepesertaan, dan pembayaran manfaat dalam satu kerangka analisis.

Kinerja finansial dan pergeseran struktural industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Indonesia selama periode Juni 2025 hingga Juni 2026 mencatatkan ekspansi dana kelolaan yang positif di mana total aset tumbuh sebesar 7,39%, meningkat dari Rp150,65 triliun menjadi Rp161,78 triliun. Akumulasi aset ini didominasi oleh Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) senilai Rp112,72 triliun (tumbuh 7,40%), sementara Program Manfaat Lain (PML) mengelola aset sebesar Rp49,06 triliun (tumbuh 7,35%). Hal ini mengonfirmasi daya tahan finansial industri DPLK yang tetap solid, sekaligus memperlihatkan tingkat konsolidasi pasar yang pekat di mana tiga pengelola terbesar yaitu DPLK BNI (Rp37,61 triliun), DPLK BRI (Rp32,89 triliun), dan DPLK Manulife Indonesia (Rp27,38 triliun)menguasai mayoritas portofolio nasional.

Meskipun total kepesertaan industri secara keseluruhan tumbuh 2,50% dari 4,12 juta menjadi 4,22 juta peserta, analisis pembahasan ini menyoroti adanya divergensi atau pergeseran struktural (*structural shift*) yang kontras antarjenis program. Kepesertaan pada skema PPIP mengalami penurunan sebesar -1,29% menjadi 2,79 juta peserta, sejalan dengan depresiasi partisipasi perusahaan pada PPIP sebesar -43,71%. Sebaliknya, segmen PML mencatatkan lonjakan kepesertaan yang sangat pesat sebesar 10,78% hingga mencapai 1,43 juta peserta, dengan kenaikan partisipasi korporasi sebesar 13,08% menjadi 4.106 perusahaan. Fenomena ini mengindikasikan transformasi prioritas di sektor dunia usaha, yang kini lebih berorientasi pada skema pencadangan kewajiban pesangon dan imbalan pascakarya korporasi dibandingkan kepesertaan iuran pasti mandiri.

Kemampuan industri DPLK dalam menjaga likuiditas serta merealisasikan pembayaran hak-hak purnatugas peserta tergolong memadai. Sepanjang periode laporan hingga Juni 2026, total pembayaran manfaat yang disalurkan oleh industri DPLK mencapai Rp14,20 triliun, yang terdiri dari klaim PPIP sebesar Rp7,73 triliun dan klaim PML sebesar Rp6,47 triliun. Meskipun porsi aset PML hanya mencakup 30,33% dari total industri, klaim PML menyumbang 45,56% dari total pembayaran manfaat nasional, sehingga menghasilkan rasio pencairan manfaat terhadap aset PML sebesar 13,19%. Tingginya tingkat penarikan klaim pada skema PML ini menegaskan krusialnya strategi penyesuaian durasi aset dan kewajiban (*asset-liability matching*) guna memitigasi risiko likuiditas pada setiap lembaga pengelola DPLK.

Akumulasi Aset dan Konsolidasi Pasar

Total aset industri DPLK mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,39%, meningkat dari Rp150,65 triliun (Juni 2025) menjadi Rp161,78 triliun (Juni 2026). Aset PPIP tetap mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp112,72 triliun (69,67% dari total aset), tumbuh 7,40% YoY. Sementara itu, aset PML tumbuh 7,35% YoY mencapai Rp49,06 triliun (30,33% dari total aset).

Tabel 1. Pertumbuhan Aset DPLK (Juni 2025 vs Juni 2026)

Indikator	Juni 2025	Juni 2026	Persentase
Aset Kelolaan	Rp150,65 Triliun	Rp161,78 Triliun	7,39%
PPIP		Rp112,72 Triliun	7,40%
PML		Rp49,06 Triliun	7,35%

Divergensi Kepesertaan: PPIP vs. PML

Jumlah total peserta DPLK tumbuh 2,50%, meningkat dari 4,12 juta peserta (Juni 2025) menjadi 4,22 juta peserta (Juni 2026). Namun, terdapat divergensi struktural yang tajam antara kedua jenis program: a.) PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti): Mengalami penurunan jumlah peserta sebesar -1,29%, berukur dari 2.824.787 peserta menjadi 2.788.341 peserta. Hal ini sejalan dengan penurunan partisipasi perusahaan pemberi kerja pada program PPIP sebesar -43,71% (dari 16.870 menjadi 9.496 perusahaan);b.) ML (Program Manfaat Lain): Mencatatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 10,78%, melonjak dari 1.291.305 peserta menjadi 1.430.530 peserta. Partisipasi perusahaan pada PML juga meningkat sebesar 13,08% menjadi 4.106 perusahaan.

Divergensi ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas korporasi di Indonesia yang semakin berfokus pada pemenuhan kewajiban imbalan kerja/pesangon (melalui skema PML) dibandingkan program pensiun murni iuran pasti individu.

Analisis Likuiditas dan Pembayaran Manfaat

Per posisi Juni 2026, total pembayaran manfaat yang direalisasikan oleh industri DPLK mencapai Rp14,20 triliun. Pembayaran manfaat PPIP menyerap Rp7,73 triliun (54,44%), sedangkan manfaat PML menyerap Rp6,47 triliun (45,56%). Beban kebutuhan likuiditas industri dapat diukur dari rasio pembayaran manfaat terhadap total aset kelolaan per posisi Juni 2026: a.) Rasio Pembayaran Manfaat Industri: 8,78% dari total aset kelolaan, di mana total pembayaran manfaat sebesar Rp14,20 triliun ditarik dari total aset sebesar Rp161,78 triliun;b.) Rasio Program PPIP: 6,86% (pembayaran manfaat sebesar Rp7,73 triliun berbanding aset PPIP sebesar Rp112,72 triliun);c.) Rasio Program PML: 13,19% (pembayaran manfaat sebesar Rp6,47 triliun berbanding aset PML sebesar Rp49,06 triliun).

Beban likuiditas pada skema PML relatif hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan PPIP.



Gambar 1. Kinerja Industri DPLK per Juni 2026

Analisis terhadap pertumbuhan aset, dinamika kepesertaan, dan rasio pembayaran manfaat selama periode 2025–2026 memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai struktur dan kinerja finansial industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indonesia. Ketiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menggambarkan kemampuan industri dalam menghimpun dan mengelola dana, memperluas cakupan kepesertaan, serta memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi pengelola DPLK, regulator, dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika perkembangan industri, mengidentifikasi ruang penguatan kinerja dan keberlanjutan, serta mendukung pengembangan sistem dana pensiun yang semakin inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif DPLK periode 2025–2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan: a.) Pertumbuhan Aset yang Resilien: Industri DPLK nasional mampu menjaga pertumbuhan aset yang solid sebesar 7,39% mencapai Rp161,78 triliun per Juni 2026, ditopang oleh kinerja akumulasi aset pada skema PPIP maupun PML;b.) Konsolidasi Oligopolistik: Industri didominasi secara kuat oleh tiga pengelola utama (BNI, BRI, Manulife) yang menguasai 60,50% total dana kelolaan nasional;c.) Pergeseran Struktur Segmen (Struktural Shift): Terjadi pergeseran tren pasar di mana kepesertaan PPIP mengalami stagnasi dan koreksi (-1,29%), sedangkan skema PML mengalami ekspansi pesat (+10,78%), menunjukkan orientasi dunia usaha yang makin menitikberatkan pada pencadangan kewajiban imbalan pascakarya korporasi;d.) Peran Likuiditas Sektor: Penyaluran pembayaran manfaat senilai Rp14,20 triliun membuktikan fungsi likuiditas DPLK yang berjalan efektif dalam memenuhi hak-hak purnatugas pekerja.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktis

Guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan penetrasi industri DPLK di Indonesia, diajukan beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan: a.) Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan): Perlunya penguatan insentif fiskal khusus bagi peserta individu PPIP untuk menahan laju penurunan kepesertaan mandiri dan mengingat besarnya nilai klaim manfaat PML (mencapai Rp6,47 triliun per Juni 2026), OJK perlu memperketat panduan manajemen risiko likuiditas dan pencocokan durasi aset-liabilitas (*asset-liability matching*) bagi DPLK dengan porsi PML yang tinggi;b.) Bagi Pengelola DPLK: Pengelola DPLK perlu memperluas kanal akuisisi berbasis digital (*digital onboarding*) guna menjangkau sektor informal dan pekerja mandiri (*gig workers*) untuk memulihkan pertumbuhan peserta PPIP dan optimalisasi instrumen investasi jangka panjang yang menghasilkan *yield* stabil guna meningkatkan nilai akumulasi aset per peserta secara berkelanjutan;c.) Bagi Dunia Usaha dan Pemberi Kerja: Mendorong korporasi untuk memanfaatkan skema PML/DPLK secara konsisten sebagai instrumen pendanaan kewajiban imbalan kerja demi menjaga kesehatan arus kas dan kepastian hak karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi DPLK. (2026). *Laporan aset DPLK: Update Juni 2026.*

Fadly, H. (2024). Optimalisasi aset lokal dalam pemberdayaan peternakan domba sebagai kesejahteraan ekonomi dan SDGs di Desa Kabuaran. *Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat, 2*(1). https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i1.960

Mursalina, R. (2023). Analisis pentingnya dana pensiun sebagai jaminan hari tua. *Jurnal Sahmiyya, 2*(1), 1–10.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024–2028.*

Panetta, I. C. (2006). *Financial markets trend: Ageing and pension system reform* (MPRA Paper No. 18391). University Library of Munich.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.*

Sari. (2025). Lembaga dana pensiun syariah sebagai instrumen perlindungan masa tua berbasis Maqashid Syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3*(2). https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2618

Yunus, S. (2025a). Analisis kepesertaan DPLK secara individu dan karakteristiknya untuk meningkatkan penetrasi dana pensiun pekerja sektor informal di Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, 4*(3). https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5333

Yunus, S. (2025b). Analisis tingkat penghasilan pensiun (TPP) pekerja dan faktor yang mempengaruhinya serta optimalisasi peran dana pensiun swasta di Indonesia. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset, 3*(3). https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i3.1709

Yunus, S. (2025c). Faktor penyebab pekerja tidak paham dana pensiun, pentingnya edukasi dan digitalisasi industri dana pensiun di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, 2*(2). https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i2.981

Yunus, S. (2025d). Persepsi dan kepemilikan generasi milenial terhadap Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk kesejahteraan hari tua. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 3*(2). https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i2.605

Yunus, S. (2025e). Persepsi dan preferensi pekerja biasa terhadap dana pensiun sebagai perencanaan hari tua. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen, 4*(2). https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i2.5002

Yunus, S. (2025f). Tantangan literasi dan inklusi dana pensiun serta dampaknya terhadap ekonomi nasional dan generasi tua di Indonesia. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 3*(3). https://doi.org/10.61132/maeswara.v3i3.1782

Yunus, S. (2026). Optimalisasi layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui pengelolaan manfaat pensiun berkala, manfaat lain, dan iuran sukarela. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4*(2). https://doi.org/10.61132/moneter.v4i2.2165